

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 351 AYAT 1 KUHP
TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIKAITKAN DENGAN
PASAL 49 KUHP TENTANG BELA PAKSA (*Noodweer*) (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Nomor 372/Pid.B/2020/Pn Pdg, Tanggal 20 Oktober 2020)**

Dedek Oktarial¹, Idris Wasahua²,

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

²Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

¹oktarial72@gmail.com

²idris.wasahua@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU NRI di jelaskan bahwa Indonesia dalam menjalankan kekuasaannya harus berdasarkan hukum (UUD NRI 1945) dan apabila di kaitkan antara Hukum dan Keadilan kaitanya sangat erat. Dalam hal memberikan hukuman terhadap seseorang yang melakukan pemukulan yang mengakibatkan luka-luka dan memar dalam tindak pidana penganiayaan yangtelah di atur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Apabila seseorang melakukan penganiayaan untuk melakukan pembelaan diri serta kehormatan harta dan benda tidak bisa dijatuhkan sanksi pidana karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 49 KUHP (*Noodweer*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dan metode analisis data yang telah terkumpul dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari perpustakaan serta bahan dari data primer dan data sekunder seperti: KUHP, KUHP, UU No.16 Tahun 2004 tentang KRI dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Perpu, serta dokumen yang terkait dengan penerapan hukum pidana penganiayaan dan hal yang terkait dengan pasal 49 KUHP (*Noodweer*). Yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kasus penganiayaan di Teluk Bayur dengan Pasal 351 ayat 1 KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 372/.B/2020/Pn Pdg, tanggal 20 Oktober 2020 adalah terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban sesuai dengan unsur-unsur penganiayaan yang dijelaskan dalam pasal tersebut.

Kata Kunci : Penganiayaan, Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), Tindak Pidana Penganiyan.

**JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 351 SECTION 1
OF THE KUHP CONCERNING THE CRIMINAL ACT OF COUNSELING
ASSOCIATED WITH ARTICLE 49 OF THE KUHP REGARDING FORCED DEFENCE
(NOODWEER)**

**(Study of District Court Decisions Number 372/Pid.B/2020/PnPg, 20
October 2020)**

Dedek Oktarial¹, Idris Wasahua²,

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

²Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

¹ oktarial72@gmail.com

² idris.wasahua@esaunggul.ac.id

ABSTRACT

In Article 1 paragraph 1 of the Law on the Republic of Indonesia, it is explained that Indonesia in exercising its power must be based on the law (UUD NRI 1945) and if the relationship between law and justice is very closely related. In the case of giving punishment to someone who does a beating that results in injuries and bruises in a criminal act of persecution that has been regulated in Article 351 paragraph 1 of the Criminal Code. If someone commits abuse to defend themselves and the honor of property and objects, criminal sanctions cannot be imposed because this has been regulated in Article 49 of the Criminal Code (Noodweer). In this study the authors used normative research methods and methods of analyzing data that had been collected qualitatively using materials from libraries and materials from primary and secondary data such as: the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Law No. 16 of 2004 concerning KRI and UU no. 48 of 2009 concerning Judicial Powers and Perpu, as well as documents related to the application of the criminal law of persecution and matters related to article 49 of the Criminal Code (Noodweer). The basis for consideration of the panel of judges in imposing a sentence on the defendant in the persecution case in Teluk Bayur with Article 351 paragraph 1 of the Criminal Code in the Padang District Court decision Number 372/.B/2020/Pn Pg, dated October 20, 2020, is that the defendant committed acts of mistreatment against the victim in accordance with with the elements of persecution described in the article.

Keywords: Persecution, Forced Defense (Noodweer), Crime of Persecution.